

**PERAN ELITE PRIBUMI
DALAM EKSPLOITASI KAPITALISME KOLONIAL:
KOMPARASI ANTARA PRASASTI DAN ARSIP**
*Indigenous Elite in Colonial Exploitation of Capitalism:
Comparison Between Inscription and Archives*

Lia Nuralia

Balai Arkeologi Bandung
Jln. Raya Cinunuk Km 17 Cileunyi Bandung
E-mail: liabalar@yahoo.com

Naskah diterima redaksi: 28 Januari 2015 – Revisi terakhir: 2 Juni 2015
Naskah disetujui terbit: 10 Juni 2015

Abstract

This paper describes the role of indigenous Elite in Colonial capitalism exploitation in 19th-20th century, in the plantation companies of Pamaneokan en Tjiasemlanden (P & T Lands) in Subang, West Java. By conducting a comparative analysis of the inscription of Colonial and Dutch Archives (The Inscription Hofland/1861 and the Inscription De Onderneming Soekamandi/1925; Archives Netherlands, “personeel in de Binnenlanden, Afdeeling Indramajoe, Landraad/Almanak van Nederlandsch-Indie voor het jaar 1816 to 1942” and “Memory Resident Karawang/Povelier, October 1929/Memorie Van Overgrave”), the role of elites can be revealed, i.e. as an intermediary for the delivery of all forms of instruction relating to the exploitation of the colonies to the indigenous people.

Keywords: indigenous elite, exploitation of capitalism, inscription, archives

Abstrak

Tulisan ini menguraikan tentang peran elite pribumi dalam eksploitasi kapitalisme kolonial pada abad ke-19–20, dalam perusahaan perkebunan *Pamanoekan en Tjiasemlanden (P & T Lands)* di Subang Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisis komparatif terhadap prasasti kolonial dan arsip Belanda. Berdasarkan Prasasti Hofland dan Prasasti *De Onderneming Soekamandi*; serta arsip Belanda, *Personeel in de Binnenlanden, Afdeeling Indramajoe, Landraad/Almanak van Nederlandsch-Indie voor het jaar 1816–1942* dan *Memori Residen Karawang/Povelier, October 1929/Memorie Van Overgrave*, peran elite pribumi dapat terungkap, yaitu sebagai perantara penyampaian segala bentuk instruksi yang berkaitan dengan eksploitasi tanah jajahan kepada rakyat pribumi.

Kata kunci: elite pribumi, eksploitasi kapitalisme, prasasti, arsip

PENDAHULUAN

Eksploitasi kapitalisme zaman Belanda melibatkan banyak orang dalam

prakteknya, baik para pejabat maupun para karyawan. Golongan para pejabat adalah para pejabat perusahaan perkebunan, para pejabat dalam struktur birokrasi

pemerintahan kolonial Belanda, dan para pejabat pribumi yang sering disebut sebagai elite pribumi. Golongan karyawan adalah para pekerja atau buruh sebagai golongan rendah/bawah, yang ditempati oleh rakyat pribumi. Peran para elite pribumi dapat dikatakan paling penting, karena berperan sebagai perantara dari berbagai instruksi pemerintah kolonial sampai terwujud dalam tindakan nyata yang wajib dilakukan oleh rakyat pribumi.

Peran para elite pribumi tersebut menjadi menarik sebagai bahan kajian sejarah dan budaya, terutama dengan ditemukannya informasi dari benda budaya atau *material culture* berbentuk prasasti. Dalam prasasti dimuat informasi kesejarahan yang kemudian menjadi bahan perbandingan untuk sumber lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu arsip. Prasasti dan arsip merupakan dua sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah yang utama/primer.

Penulisan sejarah Indonesia pada zaman Belanda berpijak pada sumber tertulis, bangunan, serta sumber tertulis dan bangunan dalam satu kesatuan sebagai sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber tertulis dapat berupa laporan tahunan, catatan-catatan harian, dan sebagainya yang dibuat pada zaman Belanda, yang kemudian dikenal sebagai arsip. Sedang sumber benda/bangunan sekaligus sumber tertulis adalah berupa prasasti yang dibuat pada zaman Belanda. Selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai prasasti kolonial dan arsip Belanda sebagai dua sumber sejarah masa kolonial.

Pengertian arsip¹ menurut Wursanto

1 Arsip dalam bahasa Belanda *archieff* dan dalam bahasa Inggris *archive*. Kata arsip ini berasal dari bahasa Yunani *arche* yang

(1991) adalah salah satu produk pekerjaan kantor (*office work*), seperti formulir, surat, dan laporan. Formulir adalah daftar isian yang dibuat atau dicetak dalam bentuk yang seragam, dipergunakan untuk mencatat atau merekam, mengumpulkan, dan mengirim informasi. Surat adalah suatu alat penyampaian informasi/keterangan-keterangan keputusan, pernyataan, pemberitahuan, permintaan, dan sebagainya, secara tertulis dari satu pihak ke pihak lain. Laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan informasi. Menurut pengertian tersebut, tidak semua surat dikatakan arsip, karena harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu.

Istilah prasasti merujuk pada sumber-sumber sejarah zaman kuna yang ditulis pada batu atau logam. Kebanyakan prasasti dibuat atas perintah penguasa di berbagai wilayah di Indonesia sejak abad ke-5 Masehi. Sejumlah kecil prasasti merupakan keputusan pengadilan yang biasanya dikenal dengan nama *jayapattra*². Beberapa prasasti mengandung uraian panjang lebar, tetapi ada pula yang hanya memuat tanggal atau nama seorang pejabat kerajaan tertentu. Pada umumnya

berarti permulaan. Kemudian kata *arche* ini berkembang menjadi kata *archia* yang berarti catatan. Selanjutnya, dari *archia* berubah lagi menjadi kata *archeion* yang berarti gedung pemerintahan. Dalam bahasa Latin disebut *archivum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah arsip (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28246/2/Chapter%20III-IV.pdf>, diakses 27 Desember 2014).

2 Prasasti-prasasti yang dikumpulkan dalam golongan *jayapattra* berisi keterangan yang berbeda sifatnya, seperti yang memuat keputusan perkara sewa menyewa (Buchari, 1995: 54). Pengertian *jayapattra* juga dapat dilihat dalam Brandes (1889: 98–149).

prasasti dikeluarkan untuk memperingati penetapan suatu daerah sebagai *sima*, yaitu daerah bebas pajak, sebagai anugrah raja kepada pejabat tertentu yang telah berjasa kepada negara atau sebagai anugerah raja untuk pemeliharaan bangunan suci tertentu (Buchari, 1995: 40, 42).

Pengertian prasasti secara lebih sederhana adalah artefak yang ditulis, umumnya berisi sumber sejarah masa lalu (Susanti, 2005: 1). Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Penemuan prasasti pada sejumlah situs arkeologi menandai akhir dari zaman prasejarah menuju zaman sejarah kuna Indonesia. Ilmu yang mempelajari tentang prasasti disebut *epigrafi*.

Penemuan prasasti juga terjadi pada zaman yang lebih kemudian, yaitu zaman kolonial Belanda disebut sebagai prasasti kolonial. Prasasti Kolonial sebagai wujud fisik tinggalan zaman Belanda pada umumnya berbahasa Belanda dan memakai aksara Latin. Juga ditemukan Prasasti Kolonial berbahasa Eropa lainnya, terutama yang dipahatkan sebagai penanda kubur/batu nisan makam Belanda. Pada arsip masa kolonial, aksara Latin banyak digunakan, meliputi bahasa-bahasa Inggris, Portugis, dan Belanda. Prasasti berbahasa Latin umumnya terdapat pada gereja-gereja, rumah dinas pejabat kolonial, benteng-benteng, tugu peringatan, meriam, mata uang, cap, dan makam.

Prasasti pada zaman Belanda dapat dilihat pada bangunan-bangunan kuna zaman Belanda, baik berupa rumah tinggal, kantor, pabrik, maupun bangunan lainnya, termasuk cerobong asap di emplasemen pabrik PT Sang Hyang Seri di Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Prasasti zaman Belanda juga ditemukan

pada bangunan yang sengaja dibuat untuk ditulis, seperti yang ditemukan di permakaman umum di Jalan Raya Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang.

Kabupaten Subang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Subang yang dikenal sekarang merupakan bekas wilayah perkebunan *Pamanoekan en Tjiasemlanden (P & T Lands)*, yang dahulu pernah berjaya dan berhasil membangun Subang dengan hasil dari komoditas ekspor perkebunan-perkebunannya pada zaman Belanda. Sejarah tentang wilayah Subang dapat ditelusuri melalui beberapa sumber tertulis, di antaranya prasasti kolonial dan arsip Belanda yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan Kabupaten Subang.

Berdasarkan data sejarah yang ada, diceritakan bahwa pasca-runtuhnya Kerajaan Pajajaran, wilayah Subang seperti halnya wilayah lain di Pulau Jawa, menjadi rebutan berbagai kekuatan. Tercatat kerajaan Banten, Mataram, Sumedanglarang, VOC³, Inggris, dan Kerajaan Belanda, berupaya menanamkan

3 VOC atau *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (Perserikatan Maskapai Hindia Timur), yang didirikan pada bulan Maret 1602 adalah perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara. Misalkan VOC memiliki wewenang melakukan peperangan (memiliki tentara), membangun benteng-benteng, dan boleh bernegosiasi atau mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain di seluruh Asia (Ricklefs, 1994: 39–40).

pengaruh di daerah yang cocok untuk dijadikan kawasan perkebunan serta strategis untuk menjangkau Batavia. Selanjutnya ketika terjadi konflik Mataram–VOC, wilayah Subang di kawasan utara, dijadikan jalur logistik pasukan Sultan Agung yang akan menyerang Batavia. Saat itulah terjadi percampuran budaya Jawa dengan Sunda, karena banyak tentara Sultan Agung yang urung kembali ke Mataram dan menetap di Subang (tahun 1771, ketika berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang) (Tim Peneliti, 2010: 9).

Pada saat pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles (1811–1816) konsesi penguasaan lahan wilayah Subang diberikan kepada swasta Eropa. Tahun 1812 tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang selanjutnya membentuk perusahaan perkebunan *Pamanoekan en Tjiasemlanden (P & T Lands)*. Penguasaan lahan yang luas ini bertahan sekalipun kekuasaan sudah beralih ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda. Lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 212.900 ha dengan hak *eigendom*⁴. Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini, pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang membawahi onderdistrik. Saat itu, wilayah Subang berada di bawah pimpinan seorang kontroleur BB (*binnenlandsch bestuur*) yang berkedudukan di Subang (Tim Peneliti, 2010: 9).

Informasi tentang sejarah perkebunan *P & T Lands* dapat diperoleh dari sumber

sejarah tertulis dan tidak tertulis⁵. Informasi yang ditemukan melalui kedua sumber tersebut bersifat fragmentaris atau tidak utuh sehingga diperlukan penggunaan kedua sumber tersebut sebagai pembanding dan pelengkap. Sumber tertulis yang bisa dijadikan bahan penulisan sejarah adalah arsip Belanda dan prasasti kolonial, sebagai bukti yang jelas tentang jejak-jejak sejarah di masa lalu.

Arsip-arsip Belanda periode Pemerintahan Hindia Belanda 1816–1942 berupa manuskrip, terbitan resmi, dan sarana bantu penelitian. Manuskrip adalah arsip-arsip bekas Kementerian Urusan Jajahan (*Ministerie van Koloniale*) yang terbagi menjadi dua seksi utama, yaitu Kementerian itu sendiri dan salinan terjemahan-terjemahan Pemerintah Hindia Belanda yang dikirimkan ke negeri Belanda dari Batavia. Terbitan Resmi berupa laporan tahunan Pemerintah Hindia Belanda kepada Majelis Perwakilan Tinggi (*koloniale verslagen*) sebagai pelengkap *Staatcourant* (diterbitkan di Belanda) sejak tahun 1851/2 dan seterusnya. Fakta dan angka resmi serta rincian undang-undang, ordonansi dan peraturan pemerintah yang dapat diterapkan di Indonesia diperoleh dari *Almanak van Nederlandsch-Indie* dan *staatsblad van Nederlandsch-Indie*, *Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, serta *Javasche Courant* (Irwin, 1995: 215–218).

Beberapa arsip Belanda dapat menjadi bahan pembanding atau pelengkap, bahkan

4 Hak *eigendom* adalah hak-hak istimewa untuk kepentingan bisnis dalam waktu yang sangat panjang, yang diberikan Pemerintah Belanda kepada pengusaha asing/swasta Eropa di Hindia Belanda.

5 Sumber sejarah tidak tertulis dalam pengertian sumber sejarah lisan (informasi sejarah dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh dan saksi sejarah), dan tradisi lisan yang diperoleh dari cerita turun temurun antar generasi.

sumber primer dalam penulisan sejarah yang berkaitan dengan ditemukannya beberapa tinggalan arkeologis. Demikian juga sebaliknya, beberapa tinggalan arkeologis berupa bangunan/benda zaman kolonial, termasuk prasasti⁶. Dengan kata lain, data sejarah dapat diperoleh secara lebih lengkap dengan melakukan komparasi antara dua sumber sejarah masa kolonial, atau melakukan komparasi antara arsip dan prasasti.

Bangunan kolonial yang ditemukan di Kabupaten Subang, yang berkaitan dengan keberadaan perusahaan perkebunan *P & T Lands* berupa dua prasasti kolonial, yang pertama ditemukan di Purwadadi⁷ yang selanjutnya disebut Prasasti Hofland (1861), dan yang kedua di Ciasem sebagai Prasasti *De Ondernemingen Soekamandi*" (1925). Prasasti sebagai data sejarah atau sumber sejarah tertulis menjadi lengkap apabila dipadukan dengan sumber tertulis arsip Belanda, yang memuat isi yang berkaitan dengan isi prasasti kolonial tersebut. Ada dua arsip Belanda yang isinya membahas tema yang sama dengan isi prasasti, yaitu *Personeel in de Binnenlanden, Afdeeling Indramajoe, Landraad (Almanak van Nederlandsch-Indie)* dan *Memori Residen Karawang (Povelier) October 1929 (Memorie Van Overgrave)*. Kedua arsip Belanda tersebut termasuk dalam kategori terbitan resmi.

Arsip Belanda dan prasasti kolonial tersebut sebagai dua sumber sejarah masa kolonial, memberi informasi tentang keberadaan perusahaan perkebunan *P & T Lands*. Informasi ini menjadi penting untuk diketahui karena perkebunan merupakan sarana eksploitasi utama penjajah Belanda, yaitu pemerasan tenaga kerja pribumi sebagai buruh kasar (kuli kebun dan kuli pabrik) (Bremen, 1997: XIV). Juga pengerukan kekayaan alam Indonesia, hasil kebun yang menjadi komoditas ekspor ketika itu.

Konteks masa lalu tentang sejarah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia secara umum dipandang sebagai sejarah perkebunan itu sendiri (O'Malley, 1988: 197). Dalam melakukan eksploitasi di tanah jajahannya, Pemerintah Belanda tidak secara langsung berhubungan dengan rakyat jajahannya. Ada tangan-tangan perantara yang melaksanakan instruksi dengan sangat baik dan memperlancar segala urusan tanah jajahan. Pemerintah Belanda dalam hal ini adalah pejabat tinggi perkebunan, rakyat jajahan adalah para pekerja kebun (kuli/buruh kebun), dan tangan-tangan perantara adalah para pejabat pribumi atau elite pribumi dalam birokrasi kolonial (pemerintahan sipil pribumi) dan atau dalam struktur perkebunan.

Berdasarkan informasi yang ada pada dua sumber sejarah masa kolonial tersebut, muncul permasalahan pokok, yaitu adanya keterlibatan pejabat pribumi dalam sistem eksploitasi kapitalisme kolonial pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Bagaimana hal tersebut diinformasikan melalui arsip Belanda dan prasasti kolonial sebagai sumber sejarah kolonial, akan diuraikan dalam tulisan ini. Dengan demikian tulisan ini bertujuan

6 Posisi prasasti dilihat dari segi tulisan yang dipahatkan merupakan sumber tertulis, sedangkan dari segi fisiknya/materinya bisa disebut sebagai benda budaya (material culture).

7 Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, wilayah kecamatan Purwadadi dan Ciasem termasuk ke dalam wilayah Karesidenan Krawang, seperti yang tercatat dalam *Almanak van Nederlandsch-Indie*.

menguraikan keterlibatan pejabat pribumi dalam sistem eksploitasi kapitalisme kolonial dengan menganalisis dua sumber sejarah masa kolonial secara komparatif atau melakukan komparasi antara arsip dan prasasti. Sumber data prasasti kolonial didapat melalui penelitian survei di tahun 2010, sedangkan sumber arsip Belanda dan beberapa sumber lainnya diperoleh melalui studi literatur tahun 2015.

DATA DAN PEMBAHASAN

Prasasti Hofland

Tugu prasasti ini merupakan prasasti kolonial yang ditemukan di Jalan Raya Purwadadi tahun 2010.



Gambar 1. Prasasti ‘Hofland’ di kompleks permakaman umum di pinggir Jalan Raya Purwadadi, Kabupaten Subang (Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bandung, 2010)

Secara administratif termasuk ke Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Secara astronomis berada pada koordinat 06°26 43,2” LS dan 107°41’12,0” BT dengan ketinggian 63 m di atas permukaan laut (Tim Peneliti, 2010: 67). Prasasti ini selanjutnya disebut Prasasti Hofland.

Prasasti Hofland terletak di tengah-tengah kuburan atau permakaman umum yang berada di pinggir Jalan Raya Purwadadi. Pada prasasti dipahatkan tulisan pada batu marmer persegi panjang dengan posisi sedikit miring ke belakang. Prasasti diberi cungkup terbuka dua umpak disangga dua tiang kayu di atas umpak di sudutnya, serta didirikan pada lantai keramik putih yang ditinggikan dari permukaan tanah sekitar 60 cm, dengan dua anak tangga di bagian muka (Saptono, 2011: 126).

Prasasti Hoffland ditulis dalam bahasa Indonesia lama (dengan ejaan lama) dan beraksara Latin. Adapun tulisan yang tertera pada prasasti tersebut sebagai berikut.

***“PER TANDA BEZAAR MAAS
TJAKRA PRADJA NJANG SOEDA
BIKINSLOKKANBEZAARTJOEROEK
AGONG DAN BANJAK LAIN LAIN
SLOKKAN BOEAT ORANG KETJIL
POENYA KA OENTOENGAN PRENTA
DARIE TOEWAN P.W. HOFLAND
DARIE TANA PAMANOEKAN &
TJIASSEM 1861”***

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas kurang lebih sebagai berikut.

“Sebagai satu peringatan besar dari Mas Tjakra Pradja yang sudah membuat saluran air (irigasi?), yaitu Curug Agung, dan saluran air lainnya

untuk orang kecil (masyarakat kurang mampu/penduduk pribumi) karena telah mendapatkan keuntungan dari tanah Pamanukan dan Ciasem, atas perintah Tuan P.W. Hofland, dari tanah Pamanoekan & Tjiasem 1861". (Tim Peneliti, 2010: 67).

Prasasti *De Onderneming Soekamandi*

Prasasti kolonial lainnya ditemukan tahun 2010 di kawasan kompleks pabrik dan perumahan PT Sang Hyang Seri⁸, merupakan kawasan perkebunan *Pamanoekan en Tjiasemlanden (P & T Lands)* pada zaman Belanda di Kecamatan Ciasem. Prasasti kolonial tersebut dipahatkan pada bekas cerobong asap pabrik, berupa menara beton menjulang tinggi, berbentuk bulat melebar di bagian bawahnya, serta berdiri pada bangunan persegi sebagai dasar bangunan. Pada zaman Belanda berfungsi sebagai cerobong asap pabrik *onderneming* Ciasem yang didirikan 1925. Secara fisik cerobong asap ini tampak masih sangat kokoh dan tulisan yang dipahatkan di bagian dasar menara juga tampak jelas dan terbaca dengan baik.

Isi prasasti tersebut adalah sebagai berikut.

"DE ONDERNEMING, SOEKAMANDI, DER, PAMANOEKAN EN TJIASEMLANDEN, WERD INGEWELD, DOOR, DEN HOOG-

DELGESTRENGEN HEER, J.R. SCHENCK DE JONG, RESIDENT VAN BATAVIA, 28 MARET 1925".

Diterjemahkan dengan bebas kurang lebih sebagai berikut.

"Perusahaan Perkebunan Soekamandi merupakan bagian dari Pamanoekan en Tjiasemlanden, diresmikan dan ditandatangani oleh Residen Batavia, J.R. Schenck de Jong, tertanggal 28 Maret 1925".



Gambar 2. Cerobong Asap PT Sanghyang Seri. Pada dasar bangunan dipahatkan Prasasti '*De Onderneming Soekamandi*' (Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bandung, 2010)

8 PT Sang Hyang Seri adalah Perusahaan Perkebunan Sisal/Padi di Sukamandi-Ciasem, berdiri 1925 sebagai bagian dari perusahaan perkebunan P & T Lands di Subang pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda (mengenai sejarah singkat perusahaan perkebunan P & T Lands dapat lihat dalam laporan penelitian arkeologi (Tim Peneliti, 2010: 9–15). Juga dalam jurnal *Purbawidya* (Nuralia, 2012: 141–160).

Arsip Belanda Personeel in de Binnenlanden, Afdeeling Indramajoe, Landraad (Almanak van Nederlandsch-Indie).

Dalam *Almanak van Nederlandsch-Indie voor het jaar 1816–1942*, pada

bagian *Personeel in de Binnenlanden, Afdeeling Indramajoe, Landraad*, disebutkan nama salah seorang pejabat pribumi seperti nama yang terpahat pada Prasasti Hoffland.

Personeel in de Binnenlanden

Afdeeling Indramajoe

S.L.P.D. Niepee, adsistens resident, fung. Notaries en vendumeester.

Radhen Prawira Negara, rangga.

G.A. van der Gengten, kommies.

Mas Karta dhi Sastra, djaksa.

Abdoel Tsaleh, penghoeloe.

Poeij Kam, hoofd der Chinezen met del title van luitenant.

*G.J. Cordesius, } agenten
der Bataviasche wees en boedelkamer*

G.A. van der Geugten, }

Landraad

De adsistent resident, president.

Radhen Prawira Negara, rangga van Indramajoe,

Mas Dhemang Hardhu Malaija, onder-collectuer van idem, }

Mas Dhemang Tjakra, districts-hoofd van Sleman }

Mas Dhemang Wira Kasoema, idem van Indramajoe west, } leden

Mas Dhemang Prawira Dhirja, idem van Lossarang, }

G.A. van der Geugten, fung, Griffier.

(Almanak van Nederlandsch-Indie voor het jaar 1816–1942: 52).

Arsip Belanda “Memori Residen Krawang (*Povelier*) October 1929”

Pada masa Pemerintahan Kompeni (VOC) dan Hindia Belanda terdapat kewajiban bagi seorang pejabat pemerintah pamong praja yang akan pindah atau berhenti untuk membuat suatu *Memorie*

van Overgrave (naskah serah jabatan). Naskah serah jabatan ini diserahkan kepada pejabat pengganti dan atasannya. *Memori van Overgrave* merupakan sumber yang memuat berbagai macam keterangan mengenai wilayah tertentu. Selain memberi ikhtisar kejadian pemerintahan, memori ini juga berisi sejarah, antropologi, ekonomi, dan lain lain. Di samping memuat keterangan-keterangan faktual, seringkali disertai juga dengan tinjauan mengenai suatu kurun waktu tertentu.

Memorie van Overgrave yang ada di daerah Jawa Barat, salah satunya adalah Memori Residen Krawang (*Povelier*) Oktober 1929. Memori ini berisi catatan tentang beberapa pokok permasalahan pemerintahan, perekonomian, pertanian, penduduk, dan kehidupan sehari-hari lainnya. Di antara catatan yang berhubungan dengan masalah perusahaan perkebunan *Pamanoekan en Tjiasemlanden* adalah sub bagian yang membahas Mata Pencaharian (*Middelen van Bestaan*). Catatan itu ditulis dalam bahasa Belanda. Adapun terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

“... MATA PENCAHARIAN

A. Pertanian

Perusahaan perkebunan. Di kersidenan Krawang ada 48 perkebunan dengan tanah hak guna usaha, yaitu 14 di distrik Purwakarta, 1 di Cikampek, 1 di Krawang dan 21 di distrik Segalaherang, Subang dan Pamanukan. Ke-21 perkebunan di ketiga distrik itu milik P.P. Tanah Pamanukan dan Ciasem. Luas seluruh tanah perkebunan itu 32.613 bau.

Perusahaan perkebunan tersebut hampir semuanya perkebunan karet atau teh, sedang ada satu di Sukamandi yang menanam serat. Perkebunan serat ini milik P.P. Tanah Pamanukan dan

Ciasem, luas tanah yang dipergunakan 6.000 bau. Perkebunan lainnya tergolong kecil, karena luas tanahnya kurang dari 1.000 bau.

Pengolahan karet hanya dilakukan oleh P.P. Tanah Pamanukan dan Ciasem. Latex yang sudah diolah dibawa ke pabrik karet Pasirbungur. Pabrik ini mengolah latex ini menjadi karet dengan cara yang dipergunakan oleh pabrik ban di Amerika. Pabrik semacam ini di Jawa Barat ada satu dan di Sumatera Timur satu. Karet dari P.P. Tanah Pamanukan dan Ciasem ini dijual ke pabrik-pabrik ban di Amerika Serikat.

P.P. Tanah Pamanukan dan Ciasem menyediakan dana sosial yang dinamakan “Stichtingfonds van de Pamanoeken en Tjiasemlanden voor Sociale Doeleinden”. Tiap tahun Direksi perusahaan diwajibkan menyerahkan satu ton karet untuk mengisi kas yayasan itu. Komisi yang mengurus dana itu diketuai oleh Residen Krawang.

Hasil dari P.P. Tanah Pamanukan dan Ciasem itu dahulu diangkut dengan kereta api ke pelabuhan Tanjung Periuk untuk selanjutnya dikapalkan keluar. Sejak tahun 1928 hasil-hasil itu diangkut dengan lori ke Pamanukan dan selanjutnya dengan perahu-tarik dipunggah ke kapal yang telah menunggu di dermaga.

P.P. Tanah Pamanukan dan Ciasem itu masih terus mengadakan perluasan. Pembukaan tanah dengan hak guna usaha masih terus dan penanaman baru menyusul. Setiap tahun perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk upah antara 4 sampai 5 juta gulden. Perusahaan ini oleh Pemerintah juga sudah diberi konsesi untuk menyewa tanah penduduk di sebelah timur Citarum, yaitu Cilamaya dan Pundung, yang

kelak akan mendapat air irigasi dari Citarum. Tanah itu disediakan untuk membuka perusahaan gula (Sk. Direktur Departemen Pemerintahan Dalam Negeri tertanggal 22 Oktober 1927 No. A II/13/24)...”

(Arsip Nasional Republik Indonesia, 1976: XL – XLI).”

Peran Elite Pribumi Melalui Komparasi Antara Prasasti dan Arsip

Peran elite pribumi tidak terlepas dari sebutan elite yang melekat kuat pada diri dan jabatannya. Istilah elite telah digunakan pada abad ke-17 untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus, kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi. Istilah elite yang lebih baru kemudian digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok fungsional dan pemangku jabatan yang memiliki status tinggi dalam masyarakat karena alasan apa pun (Bottomore, 1986: 24, 32). Sebutan elite untuk jabatan tinggi tertentu menjadi bergeser lebih luas karena menyangkut peran dan segala aktivitas sosial dan politiknya. Demikian juga dengan peran elite di Indonesia pada pertengahan abad ke-19–20, diikuti dengan kedudukannya dalam politik pemerintahan (kolonial Belanda) dan etnisitas tertentu yang berkaitan dengan kelas sosialnya dalam stratifikasi sosial Hindia Belanda⁹, seperti

9 Stratifikasi sosial masyarakat di Hindia Belanda atau Hindia Timur pada abad ke-19–20 terbagi menjadi tiga golongan/kelas sosial, yaitu (1) golongan atas yang diduduki oleh orang-orang Eropa, (2) golongan menengah sebagai perantara yang ditempati oleh orang-orang Timur asing (Cina, Arab, dan lain-lain), dan (3) golongan bawah/rendah yang merupakan kelompok masyarakat paling banyak yang

elite pribumi. Kata *pribumi* adalah kata yang mengikuti elite atau pejabat tinggi yang berasal dari bangsa asli Indonesia dengan posisinya sebagai bangsa yang dijajah, yang menempati stratifikasi sosial bawah/rendah (van Niel, 1984: 30).

Prasasti Hofland berdasarkan terjemahannya memuat isi tentang peringatan besar yang dilakukan Mas Tjakra Pradja, karena telah membangun saluran air Curug Agung, dan saluran air lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk pribumi. Saluran air sengaja dibangun atas perintah pemilik perusahaan *P & T Lands*, P.W. Hofland dan diresmikan oleh Mas Tjakra Pradja tahun 1861. Disebutkan juga bahwa pendirian saluran air dikarenakan perusahaan *P & T Lands* telah mendapatkan keuntungan besar, sehingga ada niat baik perusahaan untuk memberi sedikit keuntungan tersebut kepada penduduk setempat dengan membangun saluran air atau irigasi. Mas Tjakra Pradja, pejabat yang berwenang untuk melakukan peringatan besar di zaman Belanda memiliki kedudukan penting. Mengenai status Mas Tjakra Pradja tidak disebutkan dalam prasasti tersebut, sehingga akan ditelusuri melalui sumber sejarah lain yaitu Arsip Belanda.

Pada zaman Belanda wilayah Kecamatan Purwadadi dan Ciasem menurut *Almanak van Nederlandsch-Indie voor het jaar 1816–1942*, pada abad ke-19, wilayah Subang sekarang atau wilayah *P & T Lands* pada zaman Belanda, termasuk wilayah Karesidenan Batavia dan Karesidenan Krawang, masing-masing karesidenan terbagi ke

dalam beberapa wilayah *afdeeling*. Salah satunya adalah *Afdeeling Indramajoe* dan Mas Tjakra Pradja sebagai pejabat pribumi yang bertugas di *Afdeeling Indramajoe*.

Arsip *Personeel in de Binnenlanden, Afdeeling Indramajoe, Landraad*, menguraikan tentang beberapa pejabat pribumi di *Afdeeling* Indramayu. Salah seorang pejabat pribumi bernama *Mas Dhemang Tjakra Pradja, districts-hoofd van Sleman-leden* (Mas Dhemang Tjakra Pradja, sebagai Kepala Distrik Tanah Sleman) di *Afdeeling* Indramayu. Nama pejabat pribumi ini cocok dengan yang dipahatkan pada Prasasti Hofland, yaitu *Tjakra Pradja*. Kemudian status *Tjakra Pradja* juga tercatat dengan jelas sebagai Kepala Distrik Tanah Sleman di *Afdeeling* Indramayu. *Mas Dhemang Tjakra, districts-hoofd van Sleman* atau kepala distrik atau seorang camat, yang membawahi wilayah setingkat kecamatan atau *onder-afdeeling* pada zaman penjajahan Belanda. Kepala distrik termasuk bangsawan tinggi atau *menak* pada struktur pemerintahan sipil pribumi di Priangan (Jawa Barat). Seperti disebutkan oleh Jan Breman bahwa kepala pribumi terbagi dalam dua kelas sosial sebagai berikut.

Kelas pertama adalah kelas bangsawan tinggi atau *menak*, termasuk bupati dan kepala-kepala utama seperti wakilnya, jaksa kepala, pemuka agama, dan kepala distrik. Residen R. van der Capellen berinisiatif menyekolahkan para putra kepala untuk keterampilan yang kelak berguna untuk pemerintahan. Para menak saling berhubungan darah (Breman, 2014: 42–43).

Kelas kedua adalah *sentana*, dalam laporan colonial disebut sebagai *landjokers* bangsawan rendah. Mereka berasal dari kalangan petani dan sebagai pemuka masih

terdiri dari orang-orang Indonesia asli (pribumi) dengan beragam suku bangsa (van Niel, 1984: 15–49).

dekat keterikatannya. Untuk menandai asalnya dari keturunan baik, mereka memakai gelar *asep*, *ujang*, atau *agus*. Mulai dari tataran distrik rantai perintah menuju ke kalangan petani setempat. Urutan hierarki bangsawan ditempati oleh *lurah* atau wakilnya, *panglaku*, yang menerima perintah dari atasan. Perintah itu disampaikan oleh *lengser*, pembawa berita yang namanya menunjukkan bahwa dia harus mengerjakan semua secepatnya. Instruksi itu berasal dari *bale banding*, pusat kegiatan yang berfungsi layaknya kantor. Tugas kepada bawahan berasal dari *camat*, yang bertindak atas nama kepala distrik (Bremen, 2014: 42–43).

Kedudukan Tjakra Pradja sebagai kepala distrik/camat menjadi penting di dalam eksploitasi kolonial, karena berperan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Belanda. Seperti dikemukakan oleh Heather Sutherland (1983: 6–7) bahwa cara-cara ini sebagai perwujudan dari sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*)¹⁰ yang menjadi kebijakan kolonialisme Belanda di Indonesia. Para pejabat Belanda seperti gubernur, residen, asisten residen, kontrolir dan lain-lain selalu memiliki pendamping dalam menjalankan pemerintahan, yaitu para pejabat pribumi (pangreh praja). Mereka terdiri dari bupati, patih, wedana, camat, dan lain-lain. Berbagai instruksi kepada

rakyat selalu melalui pangreh praja, yang dikelilingi simbol-simbol penguasa tradisional¹¹. Keberadaan pangreh praja sangat menguntungkan pemerintah Belanda, selain dapat mengatasi kekurangan pejabat dan personalia juga mereka digaji lebih murah dibandingkan staf yang harus didatangkan dari Nederland. Kondisi ini juga terjadi dalam struktur perkebunan yang memanfaatkan sistem pemerintahan tidak langsung, melibatkan secara aktif elite Pribumi dalam Eksploitasi kapitalisme perkebunan.

Pejabat atau elite pribumi yang disebutkan dalam Prasasti Hofland berkaitan erat dengan keberadaan *P & T Lands* milik P.W. Hofland. Sebagai perusahaan besar yang meliputi kawasan Subang seperti sekarang ini, *P & T Lands* memiliki cabang-cabang perusahaan yang mengelola beragam tanaman. Salah satu cabang yang bergerak di bidang perusahaan padi dan sisal adalah perusahaan yang didirikan di Sukamandi, seperti yang disebutkan pada prasasti *De Onderneming Soekamandi*.

Prasasti *De Onderneming Soekamandi* berdasarkan terjemahannya memuat isi tentang pendirian cabang perusahaan perkebunan *P & T Lands* di Sukamandi, yang diresmikan oleh Residen Batavia J.R. Schenck de Jong pada tanggal 28 Maret 1925. Berdasarkan keterangan ini dapat diketahui bahwa pendirian perusahaan ini diresmikan oleh pejabat tinggi dalam jajaran birokrasi pemerintahan Belanda, yaitu seorang residen. Residen sudah pasti

¹⁰ Pemerintahan tidak langsung yang dijalankan di Indonesia kondisinya sangat berbeda dengan sistem penguasa Inggris di Birma. Monarki Birma dihapus oleh Inggris dan elit tradisional Birma disingkirkan (Sutherland, 1983: 7), sedangkan di Indonesia penguasa tradisional dimanfaatkan dan dilibatkan secara aktif dalam sistem kolonialisme Belanda dengan seperangkat aturan dan keterkaitan ikatan tradisionalnya.

¹¹ Simbol-simbol penguasa tradisional yang mengelilingi para pejabat pribumi seperti kabupaten yang terletak di depan alun-alun, payung-payung emas, pusaka-pusaka dan seterusnya (Sutherland, 1983: 7)

bukan pejabat dalam struktur perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa peresmian perusahaan perkebunan tetap harus mendapat restu dari pejabat pemerintah. Dengan kata lain, peresmian perusahaan perkebunan yang bukan milik pemerintah, tidak sepenuhnya lepas dari kontrol pemerintah.

Keterangan tentang keberadaan *P & T Lands* juga dijelaskan dalam arsip Belanda, yaitu dalam *Memori van Overgrave*, tepatnya dalam Memori Residen Krawang (*Povelier*) October 1929. Dalam memori ini ada beberapa hal penting yang disebutkan, menyangkut jumlah cabang perusahaan dengan beragam jenis tanaman, dan luas cakupan wilayah atau tanah yang dikuasai oleh perusahaan. Banyaknya jumlah cabang dan luasnya wilayah perusahaan membutuhkan orang-orang penting atau pejabat yang terlibat di dalamnya, selain tenaga kerja/buruh yang sangat banyak. Tentu saja, peran para elite pribumi pun menjadi besar dan tidak dapat disangkal bahwa mereka telah mempermudah jalannya eksploitasi kapitalisme di Hindia Belanda.

Elite pribumi merupakan golongan kelas penguasa pribumi yang menjadi kaki tangan Pemerintah Belanda, baik elite perkotaan maupun elite yang ada di desa-desa. Elite pribumi ini biasanya menduduki posisi penting dalam struktur birokrasi Pemerintah Belanda, tepatnya pemerintahan sipil pribumi. Elite pribumi yang memiliki kedudukan paling tinggi adalah yang menguasai wilayah setingkat kabupaten yang disebut bupati.

Dalam historiografi Belanda, hubungan antara penguasa pribumi dan pejabat-pejabatnya disebut *feudal*¹². Belanda

melihat kemiripan antara hubungan ini dan feodalisme Eropa. Istilah *feudal* untuk Jawa mungkin kurang tepat, ada istilah yang lebih netral yaitu *lungguh* untuk memperlihatkan pemberian upah kepada bangsawan Jawa. Istilah *lungguh* bagi orang Belanda memiliki konotasi *feudal*, tetapi *lungguh* di Jawa Tengah harus dianggap sebagai pemberian *prebendal*¹³ dan tidak semua *lungguh* mempunyai ciri *prebendal* (Boomgaard, 2004: 32–33).

Peran elite pribumi digambarkan berperan ganda dengan konsekuensi ganda juga, sebagai bawahan Belanda dan juga sebagai raja kecil di mata rakyatnya dengan berbagai tanggung jawab dan kesenangan hidup. Pada awalnya Kerajaan Belanda berperan menggantikan VOC di Hindia Belanda dengan cukup bijaksana. Layaknya VOC, mereka berada di

Eropa) berasal dari kata Latin *feudum* yang sama artinya dengan *fief*, sebidang tanah yang diberikan untuk sementara kepada seorang *vassal* (penguasa bawahan atau pemimpin militer) sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada penguasa (*lord*) sebagai pemilik tanah tersebut. Dalam hal ini feodalisme berarti penguasaan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah khususnya yang terjadi di Eropa Abad Pertengahan. Feodalisme pada umumnya dikenal sebagai sistem sosial khas Abad Pertengahan (di Eropa maupun di belahan dunia lain) sebagai pembeda periode tersebut dari periode modern. Istilah tersebut dimunculkan di Perancis pada abad ke-16 (Boomgaard, 2004: 32).

¹³ Istilah *prebendal* atau *prebendal domain* meminjam dari istilah yang dikemukakan Max Weber, untuk masyarakat yang suatu urusan birokrasi patrimonialnya dibayar dengan hak untuk memperoleh upeti dari tanah-tanah tertentu. Istilah ini diusulkan oleh Eric Wolf (1966: 50–51) dan digunakan para sejarawan untuk membedakan atau membatasi istilah feodal di Eropa dan Jepang (Boomgaard, 2004: 32).

¹² Istilah *feodal* atau *feudal* (dalam konteks

belakang para kepala desa, tetapi cukup sadar bahwa jika mereka tidak diawasi dengan ketat maka para kepala desa ini akan dapat membahayakan kekuatan Belanda. Transformasi yang tidak disadari dan diam-diam ini menjadi pelindung yang sebenarnya adalah pekerjaan Daendels dan Raffles. Sampai pada masa mereka, para kepala desa dan pangeran pribumi menjadi rekan yang samar, dan beberapa menjadi kawan yang sangat tergantung pada Belanda, tetapi di bawah kedua orang tersebut mereka menjadi pegawai dihargai, dan berada di bawah kekuasaan Eropa (Cabaton, 2015: 218–219).

Elite pribumi yang ada di Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya juga berperan aktif secara langsung dalam usaha-usaha pemerintah Belanda memenuhi kas negaranya dengan pundi-pundi uang yang berlimpah. Hal ini dilakukan karena kaharusan sebagai bawahan dan kepentingan sebagai pribadi untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan hasratnya akan kekayaan yang berlimpah juga. Demikian juga dalam mempermudah kelancaran bisnis perkebunan dengan sistem kapitalismenya.

Perusahaan perkebunan di Hindia Belanda mulai berkembang dan mencapai puncaknya pada ke-19, terutama yang diusahakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada awal abad ke-19, tepatnya di tahun 1830, di bawah Gubernur Jenderal Johanes van den Bosch, misi utama Pemerintah Hindia Belanda adalah meningkatkan produksi tanaman ekspor (Leirissa, 1990: 97–118). Salah satu usaha van den Bosch untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor adalah dengan mencanangkan *cultuurstelsel* (sistem tanam paksa). Dalam pelaksanaannya sistem ini berhasil menambah kas negara

dan memperluas usaha perkebunan dengan membuka lahan-lahan baru, terutama ketika keluar kebijakan pemerintah yang memberi hak *eigendom* kepada pengusaha swasta asing (Eropa) untuk mendirikan perusahaan perkebunan baru di tanah-tanah partikelir. Salah satunya adalah perusahaan perkebunan *P & T Lands* di wilayah Subang sekarang. Salah satu cabang perusahaan *P & T Lands* yang didirikan di awal abad ke-20 (1925) adalah Perusahaan Padi/Sisal Sukamandi di daerah Ciasem Subang.

Dalam sistem eksploitasi *cultuurstelsel*, pemerintah kolonial memanfaatkan ikatan-ikatan feodal dan tradisional yang terdapat di Jawa antara rakyat dan penguasa/elite pribumi. Sistem tanam paksa menimbulkan berbagai perubahan dalam peri kehidupan masyarakat dengan beberapa akibat yang tidak diinginkan, khususnya disintegrasi struktur sosial masyarakat. Disintegrasi ini terutama disebabkan oleh makin meresapnya ekonomi dan lalu lintas uang yang sebelumnya tidak dikenal dalam masyarakat (Hardjosudarmo, 1970: 69). Demikian juga dalam *P & T Lands*, ikatan-ikatan feodal dimanfaatkan dengan melibatkan pejabat-pejabat pribumi dalam rangka pengawasan perusahaan dan penarikan hasil, termasuk perusahaan Sukamandi.

P.W. Hofland sebagai pendiri perusahaan perkebunan *P & T Lands*, berkuasa hampir selama 32 tahun. Di bawah kekuasaannya, *P & T Lands* mengalami perkembangan sangat pesat sebagai perusahaan perkebunan besar. Untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan tanah-tanahnya, Hofland mengikutsertakan penduduk pribumi, terutama golongan elitnya, turut serta mengatur wilayah *P*

& *T Lands* dengan membaginya menjadi delapan kademangan¹⁴.

Pada tahun-tahun pertama pelaksanaan *cultuurstelsel* membuktikan sebagai suatu sistem eksploitasi yang efisien yang berhasil meningkatkan penerimaan pemerintah kolonial. Melalui *batig slot* dalam anggarannya, pemerintah Kolonial Belanda berhasil menutupi defisit yang dialami pemerintah Belanda maupun meningkatkan kemakmuran bangsa Belanda. Bagi rakyat Indonesia yang terjadi adalah timbulnya penderitaan dan kesengsaraan besar. Dalam tahun-tahun terakhir sistem tanam paksa tidak begitu efisien, sehingga timbul keinginan pihak swasta Belanda untuk berperan dalam eksploitasi sumber-sumber alam di Hindia-Belanda. Akhirnya pada sekitar 1870 sistem tanam paksa dihapus dan terbukalah peluang bagi pemodal swasta memasuki Hindia Belanda. Pada tahun 1870 ini Belanda memasuki kapitalisme modern dan di Hindia Belanda dianggap sebagai permulaan politik kolonial liberal (Kartodirdjo, 1990: 13, 17, 23–24).

Perusahaan perkebunan *P & T Lands* berdiri antara abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Para periode ini merupakan puncak kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, sekaligus merupakan puncak penderitaan rakyat Indonesia sebagai akibat sistem eksploitasi kolonialnya. Pemerintah Hindia Belanda telah memperoleh bentuk wilayah kekuasaan dan sistem pemerintahannya, sampai meninggalkan

pada akhir pemerintahan tahun 1942 (Daliman, 2012: 1).

Perusahaan perkebunan *P & T Lands* berdiri pada periode emas kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda, yaitu puncaknya penjajahan Belanda. Puncak-puncak kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda seiring dengan perkembangan politik yang terjadi di negeri Belanda. Kemenangan Kaum Liberal di Belanda berdampak pada perubahan politik kolonial di Hindia Belanda. Politik kolonial berdampak pada kebijakan ekonomi pemerintah yang juga sebagai akibat dari adanya perkembangan kapitalisme di Eropa. Perkembangan kapitalisme yang terjadi di Eropa berdampak kepada perkembangan kapitalisme di wilayah negeri jajahannya, yaitu ke wilayah pertanian yang dimulai dari proses kapitalisasi perkebunan. Di tanah Hindia terjadi dalam paruh kedua abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, yang ditandai oleh kecenderungan menuju satu sistem *plantation estate company*¹⁵ yang sangat kapitalistik (Aptianto, 2015: 336–337).

SIMPULAN

Sumber sejarah masa kolonial yang sangat penting di antaranya adalah prasasti dan arsip. Dengan melakukan analisis

14 Kedelapan kademangan di Subang, yaitu: (1) Batusirap di Batusirap, kemudian pindah ke Cisolak, (2) Sagalaherang di Sagalaherang, (3) Ciherang di Ciherang, (4) Pagaden di Pagaden, (5) Pamanukan di Pamanukan, (6) Ciasem di Ciasem, (7) Malang di Purwadadi, dan (8) Kalijati di Kalijati (Kusma dkk, 2007).

15 Ada lima ciri penting dalam *plantation estate company*, yaitu (1) Sistem ekonomi perkebunan besar ditopang oleh dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditas hasil perkebunan harus diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional, (2) Perkebunan besar menguasai tanah yang luas, tidak terbatas atau tidak dibatasi, (3) Kebutuhan tenaga kerja sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerja yang tersedia di pasar, karena itu diciptakanlah mekanisme ekstra pasar (budak belian, kuli kontrak, transmigrasi, dan sejenisnya),

terhadap kedua sumber sejarah tersebut, bahan penulisan menjadi lengkap dan saling mendukung. Kedua sumber sejarah tersebut disebut sebagai prasasti kolonial dan arsip Belanda. Prasasti kolonial terdiri dari dua prasasti yang ditemukan di Kabupaten Subang, yaitu Prasasti Hofland dan Prasasti *De Onderneming Soekamandi*. Kemudian arsip Belanda juga terdiri dari dua jenis arsip, yaitu *Personeel in de Binnenlanden*, *Afdeeling Indramajoe*, *Landraad* (*Almanak van Nederlandsch-Indie voor het jaar 1816–1942*) dan *Memori Residen Karawang (Povelier) October 1929 (Memorie Van Overgrave)*.

Prasasti kolonial dan arsip Belanda berisi tentang peristiwa sejarah dan budaya pada masa lalu. Dalam kajian ini dapat mengungkap tentang peran elite

pribumi dalam eksploitasi kapitalisme kolonial pada abad ke-19 – 20, khususnya berkaitan dengan keberadaan perusahaan perkebunan *P & T Lands* di Subang. Elite pribumi merupakan kepanjangan tangan (perantara) dari Pemerintah Belanda (pejabat dalam struktur perkebunan) dalam melaksanakan eksploitasinya di Hindia Belanda, khususnya di wilayah Subang. Dengan memanfaatkan sistem pemerintah tidak langsung (*indirect rule*) yang berlaku di Hindia Belanda ketika itu, pejabat perkebunan *P & T Lands* melibatkan elite pribumi secara aktif. Elite pribumi mendapat instruksi langsung dari pejabat perkebunan, dan instruksi tersebut dilanjutkan kepada rakyat pribumi untuk kemudian dilaksanakan dalam tindakan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanak van Nederlandsch-Indie voor het jaar 1816–1942*, *Personeel in de Binnenlanden*, *Afdeeling Indramajoe*, *Landraad*.
- Aptianto, Tri Chandra. 2015. Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember Dalam Perubahan Zaman 1900–1970. Dalam Freek Colombijn dkk (Ed.). *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia*: 334–356. Yogyakarta: Ombak.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1976. *Memori Serah Jabatan 1921–1930 (Jawa Barat)*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 8. Jakarta: Arsip Nasional Indonesia.
- Boomgaard, Peter. 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795–1880*. Jakarta: Djambatan.
- Bottomore, T.B. 1986. Kelompok Elite dan Masyarakat. Dalam Sartono Kartodirdjo (Ed.). *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*: 24–46. Jakarta: LP3ES.
- Brandes, J.L.A. 1889. *Een jayapattra, of acte van rechterlijke uitspraak van Caka 849*. TBG XXXII: 98–149.
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur Pada Awal Abad Ke-20*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

(4) Perkebunan besar dikelola dengan cara sangat ketat, dan tercatat dalam sejarah sebagai cenderung bengis. Birokrasi semacam ini oleh sementara pakar disebut dengan istilah *plantokrasi*, (5) Birokrasi perkebunan besar tidak terjangkau oleh kontrak sosial, karena pada umumnya perkebunan besar merupakan *enclave* yang terisolasi dari masyarakat (Aptianto, 2015: 337–338).

- Breman, Jan. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720–1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Buchari. 1995. Epigrafi dan Historiografi Indonesia. Dalam Soedjatmoko dkk (Editor). *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*: 39–57. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cabaton, Antoine. 2015. *Jawa, Sumatera & Kepulauan Lain di Hindia Belanda*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Daliman, A. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda*. Yogyakarta: Ombak.
- Hardjosudarmo, Soedigdo. 1970. *Masalah Tanah di Indonesia: Suatu Studi Sekitar Pelaksanaan Landreform di Jawa dan Madura*. Jakarta: Bhratara.
- Irwin, Graham. 1995. Sumber-Sumber Sejarah Belanda. Dalam Soedjatmoko dkk (Ed.). *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*: 204–221. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Kusma dkk. 2007. *Sejarah Kabupaten Subang*. Subang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Subang.
- Leirissa, R.Z. 1990. *Nusantara di Abad ke-18 dan ke-19. Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nuralia, Lia. 2012. Tinggalan Arkeologis Masyarakat Pesisir Utara Jawa Bagian Barat dan Kaitannya dengan Perubahan Budaya. *Purbawidya*, 1 (1): 141–160.
- O'Malley, William J. 1988. Perkebunan 1830–1940: Ikhtisar. Dalam Anne Booth et al. (Ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*: 197–235. Jakarta: LP3ES.
- Ricklefs. 1994. *Sejarah Modern Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saptono, Nanang. 2011. Kota Subang Dalam Kaitannya Dengan Struktur Masyarakat. Dalam Supratikno Rahardjo (Ed.). *Arkeologi Pola Pemukiman dan Lingkungan Hidup*: 115–130. Bandung: Al-Qaprint.
- Susanti, Y. Ninie. 2005. Antara Prasasti dan Naskah Sastra: Data Sejarah di Dalam Prasasti-Prasasti Airlangga dan Kakawin Arjunawiwaha. *Makalah dalam Seminar Internasional Jawa Kuna “Mengenang Jasa-Jasa Prof. DR. P.J. Zoetmulder S.J.: Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa Kuna”*. Depok 8–9 Juli: Program Studi Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Tim Peneliti. 2010. *Permukiman Puncak-Puncak Peradaban Awal Masehi Sampai Masa Kolonial di Kabupaten Subang Jawa Barat*. Laporan Penelitian. Bandung: Balai Arkeologi Bandung.
- van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Wursanto, Ig. 1991. *Kearsipan I*. Yogyakarta: Kanisius. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28246/2/Chapter%20III-IV.pdf>, diakses 27 Desember 2014).